

Berdasarkan pembahasan penulis mencoba merangkum tentang pelaksanaan penyusunan kebijakan perijinan yang telah dilaksanakan di kantor perijinan kabupaten sleman diantaranya adalah beberapa permasalahan yang menyangkut :

- a) Komunikasi
- b) Ketersediaan sumber daya
- c) Struktur birokrasi
- d) Perilaku aparatur

B. Saran

Saran yang sebaiknya dilakukan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Sleman adalah :

1. Penyederhanaan proses dan waktu diharapkan bukan berarti mempermudah proses perijinan khususnya di bidang lingkungan hidup, mengingat setiap orang wajib untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk kepentingan generasi yang akan datang.
2. Kantor yang dibuat dalam rangka perijinan diharapkan dapat tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam pelayanan untuk melakukan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
3. Pengaturan pelayanan perijinan terpadu dalam bidang pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Sleman setelah diberlakukannya unit pelayanan perijinan terpadu di daerah, diharapkan tidak menghilangkan substansi dari ijin lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta : MSP.
- Darumurti, Krishna, D, 2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Devas, Nick dan Brian Binder, 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : UI-Press
- Faisal Tarnin, 1998, *Reformasi dan Reorientasi Paradigma Otonomi Daerah* (Makalah), Seminar HMI Cab. Malang.
- Hasibuan, Nurimansyah, 1991, *Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah*, Jakarta : Prisma.
- Hidayat, Syarif, 2000, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*, Jakarta: Pustaka Quantum
- Hirawan, Susiyati B. 1987. *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta : LPFE UI.
- Jhingan, M. L. 1983. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Kristadi JB, 1986, *Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Bandung : Alumni.
- Moch. Mafud MD. *Reformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Makalah), Seminar Otonomi Daerah Unibraw, 2000.
- Riwu Kaho, Yosef, 1985, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 1991, *Otonomi Daerah dan Titik Beratnya diletakkan pada Daerah Tingkat II*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rodee, Carlton Clymer. 2006. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solinger J. Dorothy, 1996, *Despite Decentralization : Disadvantages, Dependence and Ongoing Central Power in the Inland-the Case of Wuhan* (Journal), The China Quarterly.
- Steers, Ricard M. 1985. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*, Seri Manajemen No. 47, Jakarta: Erlangga